

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran masih menjadi permasalahan ekonomi terpenting yang dihadapi beberapa sistem ekonomi, social, dan politik di dunia karena memiliki dampak negatif untuk pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Menurut ILO (International Labour Organization) tingkat pengangguran global pada tahun 2020 sebesar 6,9 persen yang dikarenakan oleh pandemi covid-19¹. Laporan *Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people* menemukan bahwa pandemi telah memperburuk berbagai tantangan pasar tenaga kerja yang dihadapi oleh mereka yang sudah berumur 15 hingga 24 tahun. Sejak awal 2020, jumlah pengangguran kaum muda di seluruh dunia diperkirakan mencapai 73 juta orang, lebih sedikit daripada orang dewasa ². Dampak pandemi covid-19 telah menimbulkan masalah di beberapa sektor, seperti di bidang kesehatan dan sektor ekonomi. Semenjak adanya pandemi hampir diseluruh negara mengalami masalah perekonomian seperti tidak terkecuali di Negara Indonesia (Putri & Azzahra, 2021). Pengangguran menjadi indikator ekonomi yang penting karena mencerminkan kemampuan atau ketidakmampuan

¹ International Labour Organization: Diakses: 4 Juli 2023, tersedia di situs: <https://ilostat.ilo.org/assessing-the-current-state-of-the-global-labour-market-implications-for-achieving-the-global-goals/>

² International Labour Organization: Diakses: 13 Juli, 2023 tersedia di situs: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_853078/lang--en/index.htm

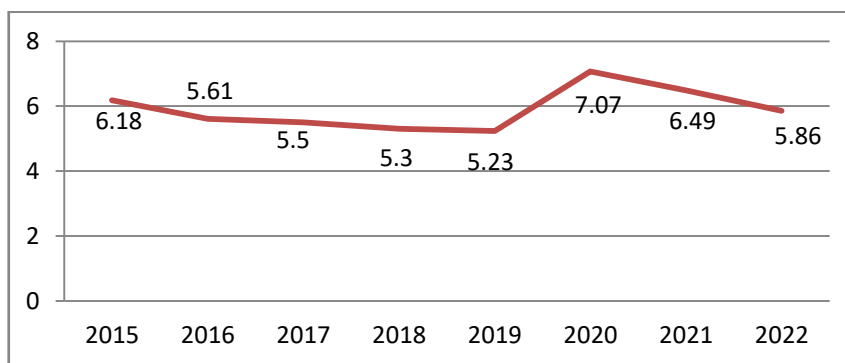
pekerja untuk mencari pekerjaan dan berkontribusi pada output ekonomi sehingga tingkat pengangguran ini menjadi sebuah indikator dalam mengukur perkembangan negara. Besarnya maupun kecilnya angka pengangguran di negara tersebut akan menunjukkan perekonomian wilayah/negaranya membaik atau memburuk (Wijayanti & Karmini, 2014).

Pengangguran sangat bergantung dengan aktivitas ekonomi, ketika aktivitas ekonomi tinggi maka lebih banyak produksi terjadi secara keseluruhan, dan lebih banyak membutuhkan pekerja dalam menghasilkan suatu barang maupun jasa dengan jumlah yang tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi rendah, perusahaan-perusahaan memangkas pekerjaan sehingga pengangguran meningkat. Dalam hal ini, pengangguran bersifat *countercyclical*, yaitu pengangguran akan meningkat ketika pertumbuhan ekonomi rendah dan sebaliknya³.

Indonesia adalah salah satu negara dalam tahap berkembang, dengan salah satu tantangan yang dihadapi yaitu pengangguran. Pengangguran masih menjadi masalah makro ekonomi yang sampai kini masih menjadi perhatian pemerintah. Menurut (Wulandari & Marwan, 2019) tantangan kesempatan kerja atau pengangguran merupakan sebuah tantangan yang dihadapi Indonesia dan cukup berat untuk dipecahkan. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa adalah pendapatan seseorang. Pengangguran dapat menghambat kebutuhan ekonomi dan menyebabkan tingginya angka kriminalitas serta melemahkan daya beli masyarakat. Dalam mengetahui naik

³ International Monetary Fund: Diakses: 13 Juli 2023 tersedia di situs: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/32-unemployment.htm>

atau turunnya angka pengangguran dapat dilihat dari tingkat penganggurannya dinyatakan dalam bentuk presentase. dan rasio dari perhitungan jumlah pengangguran yang disebut tingkat pengangguran terbuka. Berikut presentase TPT di Indonesia periode 2015-2022 :



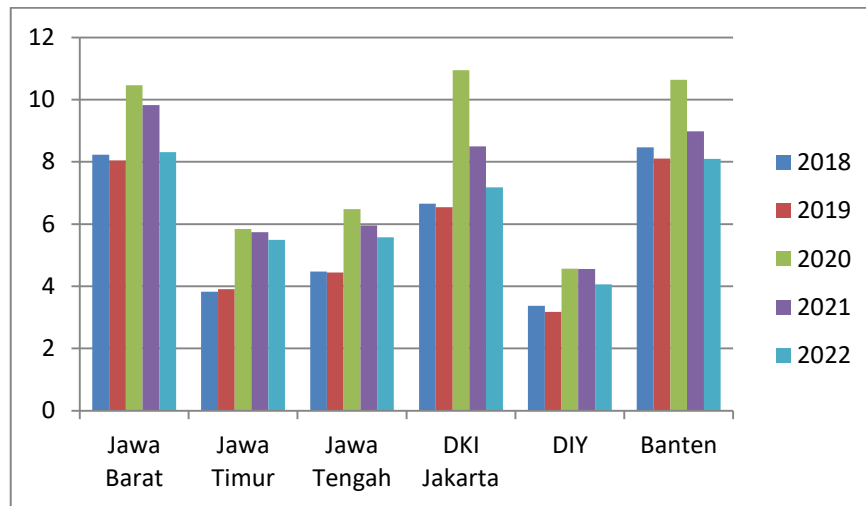
Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1. 1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2015 - 2022

Berdasarkan grafik 1.1 diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada periode 2015-2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015-2019 tingkat pengangguran indonesia terjadi penurunan dari sebesar 6,18% menjadi 5,23% sedangkan pada berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,84% sehingga menyentuh angka 7,07% pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 6,49% dan kembali menurun di tahun berikutnya menjadi 5,86% yakni tahun 2022.

Dengan mengambil sampel TPT pada pulau jawa karena sebagai suatu pulau yang total penduduknya terbanyak di Indonesia, menurut BPS yakni 154,34 juta jiwa pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan jumlah warga

Indonesia pada tahun 2022 yakni 275,77 juta jiwa maka dapat diartikan bahwa 50% lebih penduduk Indonesia menduduki wilayah pulau jawa.



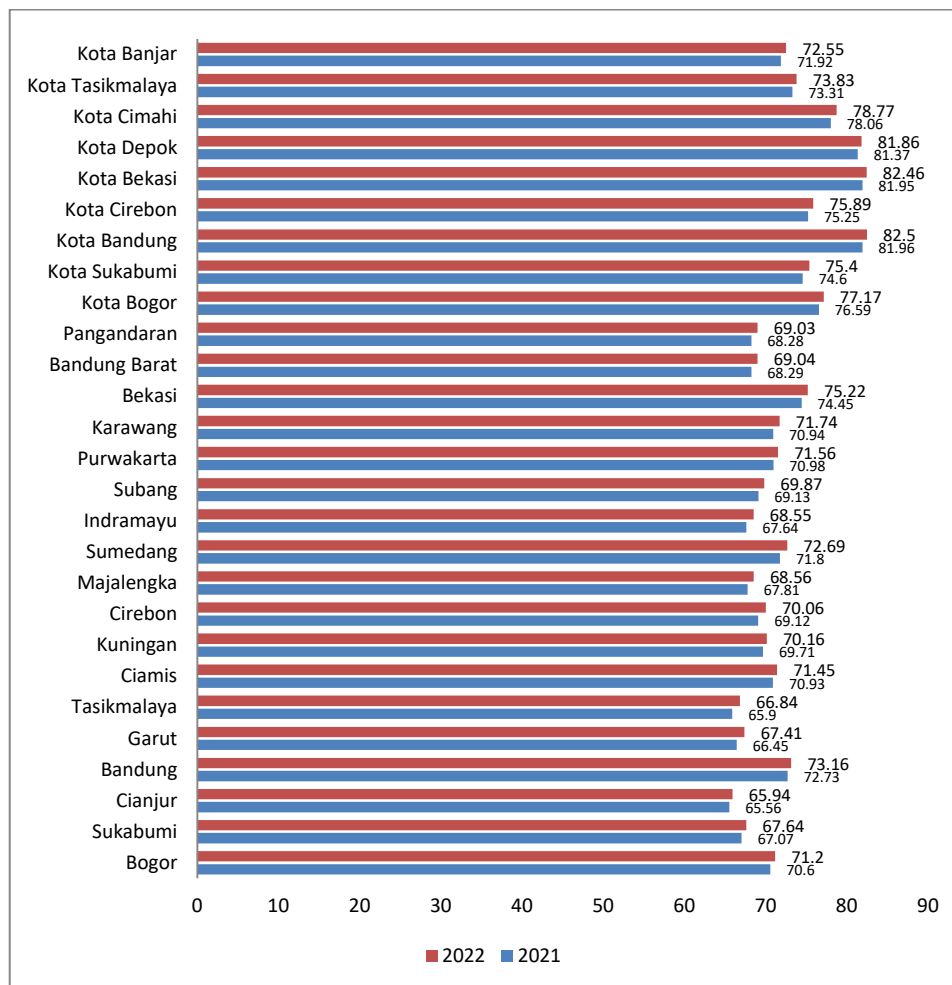
Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1. 2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di pulau Jawa tahun 2018-2022

Statistik TPT dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada grafik 1.2 terhadap 6 provinsi di pulau jawa dinyatakan jika dilihat dari tahun 2018-2022 setiap provinsi mengalami fluktuasi. Kenaikan tertinggi berada di tahun 2020. Hal tersebut tersebut kemungkinan besar terjadi akibat banyak perusahaan-perusahaan memutuskan untuk PHK karyawannya karena wabah covid-19 yang menerpa di berbagai Negara, khususnya Indonesia. Pada wabah covid-19 tahun 2020 tingkat pengangguran tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta sebesar 10,95%. Namun pada tahun berikutnya 2021-2022 semua provinsi di pulau jawa mengalami penurunan. Tahun 2021 mencatat angka pengangguran di Jawa Barat sebesar 9,82%, di Jawa Timur sekitar 5,74%, di Jawa Tengah sekitar 5,95%, di DKI Jakarta sekitar 8,5%, di DIY sekitar

4,6%, dan di Banten sekitar 8,98%. Pada tahun 2022, provinsi Jawa Barat mencatat angka pengangguran terbanyak di Pulau Jawa, bahkan melampaui semua provinsi lainnya di Indonesia. Menurut data dari BPS pada periode tahun 2022 provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada pada provinsi Jawa Barat yakni 8,31%, Kepulauan Riau sebesar 8,21%, dan Banten 8,09%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini tentunya terdapat beberapa indikator yang berpengaruh. Adapun salah satu indikator yang berpengaruh yaitu IPM atau bisa diartikan sebagai kesejahteraan hidup manusia. Melalui IPM bisa melihat bagaimana warga negara dapat memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya atas hasil pembangunan ekonomi (Lailatul Qamariyah et al., 2022).



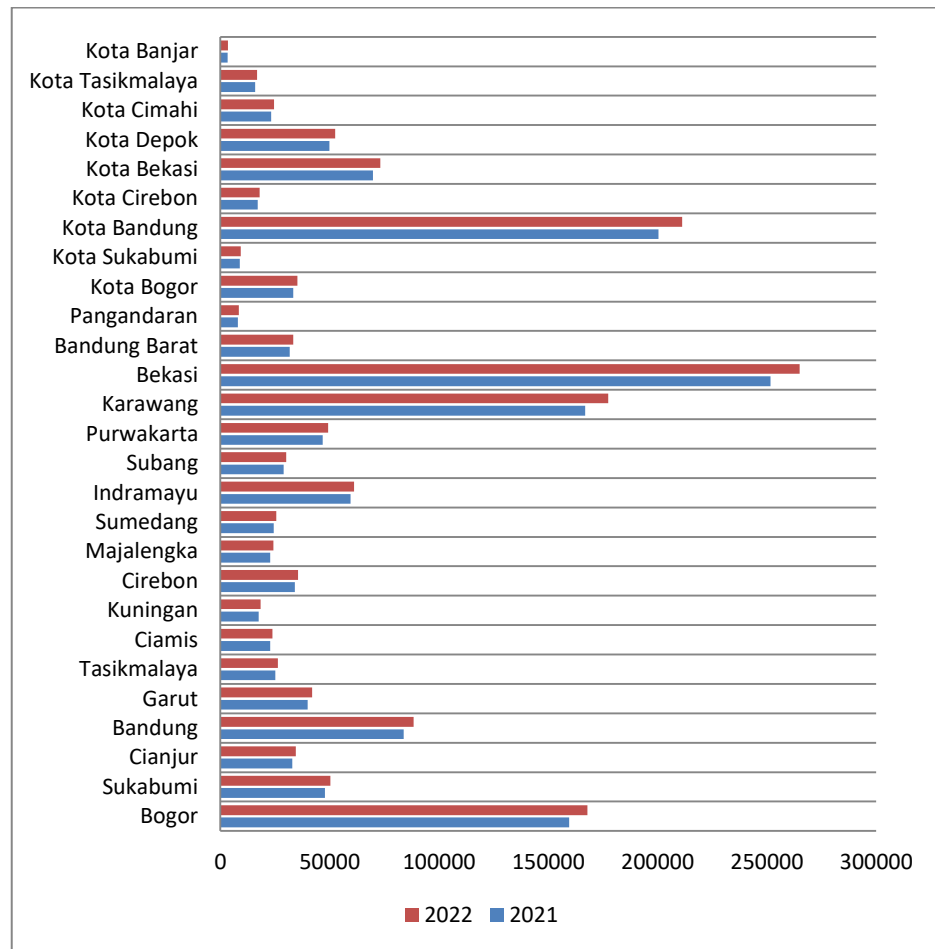
Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2021-2022

Berdasarkan grafik 1.3 diatas, terdapat peningkatan IPM pada 18 kabupaten dan 9 kota provinsi Jawa Barat dari tahun 2021-2022, pada 2022 kota bandung menghasilkan nilai IPM tertinggi yakni 82,5%. Dengan meningkatnya nilai IPM dapat berpengaruh dalam produktifitas maupun kualitas kerja maka persentase TPT akan mengalami penurunan (Lailatul Qamariyah et al., 2022). Sedangkan persentase IPM terendah terdapat di daerah cianjur yang hanya sebesar 65,94% dan memiliki selisih sebesar

16,56% dari persentase IPM tertinggi. Meskipun kabupaten Cianjur terjadi kenaikan nilai IPM dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dijelaskan pemerintah Jabar dalam pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Cianjur masih kurang.

Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) memberi wawasan mengenai kinerja dalam pengembangan ekonomi, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah perekonomian daerah. PDRB ADHK dipakai untuk mewakili indikator pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dari setiap tahunnya (Tutupoho, 2019). Saat produksi barang/jasa meningkat setiap tahunnya maka dapat dikatakan perekonomian pada daerah tersebut mengalami kenaikan. Sehingga dengan meningkatnya PDRB, meningkat pula terserapnya tenaga kerja dalam produksi barang dan jasa. Peningkatan PDRB di setiap kabupaten/kota, dialokasikan pada kegiatan ekonomi berorientasi sektoral riil, sehingga membantu meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran (Laksamana, 2016).



Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1. 4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2021-2022

Pada grafik 1.4 diatas menunjukkan PDRB setiap kab/kota di Jawa Barat dari periode 2021-2022 mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2021 sebesar 159.589,55 sedangkan PDRB terendah berada di kota banjar yakni 3.365,25. Kemudian pada tahun 2022 rata-rata kabupaten/kota mengalami peningkatan dan pada 2022 PDRB tertinggi berada di kabupaten bekasi yakni 167.966,18 . Sedangkan pada tahun 2022 PDRB terendah adalah kota banjar yaitu sebesar 3.506,25 dari tahun 2022. Perbedaan PDRB yang

dihasilkan dari masing-masing kabupaten dan kota dikarenakan berbagai faktor, seperti SDA, SDM, letak strategis daerahnya, serta komoditi unggulan yang berbeda di setiap daerah. PDRB juga dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, jadi dapat dilihat bahwa di kabupaten bekasi menunjukkan adanya perekonomian yang tinggi daripada wilayah lainnya.

Faktor selanjutnya yaitu Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) juga menjadi akibat pada tingkat pengangguran. UMK merupakan standar minimum upah bagi tenaga kerja di suatu wilayah kabupaten/kota dan UMK ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah. Penetapan tingkat upah oleh pemerintah dalam suatu negara akan memengaruhi tingkat pengangguran karena pekerja di suatu negara akan berkurang seiring dengan peningkatan tingkat upah sehingga menyebabkan pengangguran meningkat (Kaufman & Hotchkiss, 1999). Dengan peningkatan Upah Minimum Kabupaten mengakibatkan pengangguran yang lebih tinggi, mungkin sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (Mahendra & Utomo, 2023).

Tabel 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2015-2022

Tahun	Kab/kota Tertinggi	Kab/kota Terendah
	Kota Bekasi	Kota Banjar
2015	Rp 2,954,031.00	Rp 1,168,000.00
2016	Rp 3,327,160.00	Rp 1,327,965.00
2017	Rp 3,601,650.00	Rp 1,437,522.00
2018	Rp 3,915,354.00	Rp 1,562,730.00
2019	Rp 4,229,756.00	Rp 1,688,217.00
2020	Rp 4,589,708.00	Rp 1,831,884.00
2021	Rp 4,782,935.00	Rp 1,831,884.00
2022	Rp 4,816,921.00	Rp 1,852,099.00

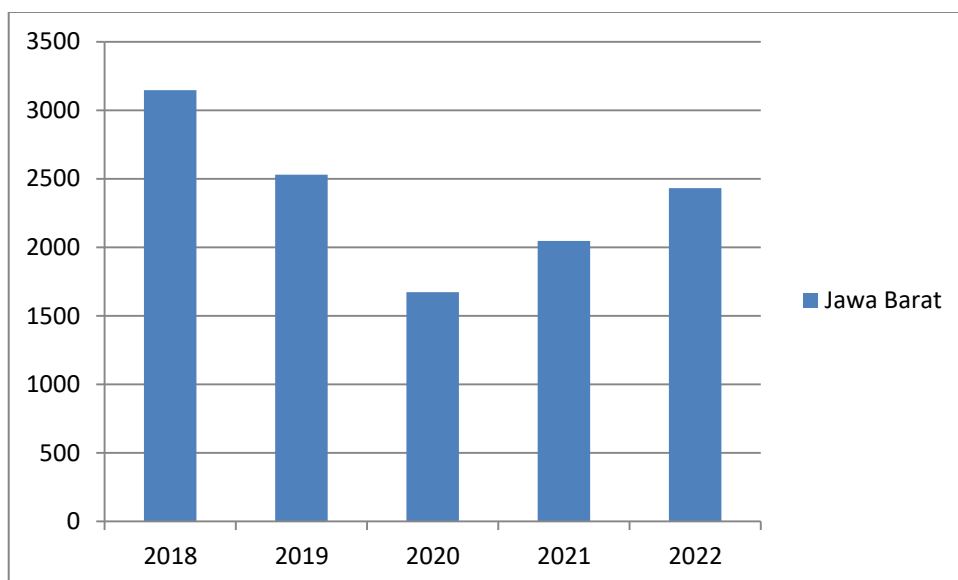
Sumber : PPID Jawa Barat yang diolah (2023)

Dari tabel 1.1 dijelaskan kota Bekasi mempunyai UMK tertinggi pada tahun 2022 dari seluruh wilayah di provinsi Jawa Barat. Sedangkan UMK terendah di tahun 2022 berada pada kota Banjar. Pada tahun 2015 kota Bekasi mencapai Rp. 2,954,031.00, tahun 2016 Rp. 3,327,160.00, tahun 2017 yakni Rp. 3,601,650.00, dan terus mengalami peningkatan tahun 2018 yakni Rp. 3,915,354.00, tahun 2019 Rp. 4,229,756.00, periode 2020 Rp. 4,589,708.00, kemudian pada 2021 sebesar Rp. 4,782,935.00, serta tahun 2022 sebesar Rp. 4,816,921.00.

Kemudian kota Banjar dari tahun 2015-2022 juga mengalami peningkatan UMK tetapi tidak terlalu signifikan pada tahun 2015 yakni Rp. 1,168,000.00, pada 2016 senilai Rp. 1,327,965.00, tahun 2017 yakni Rp. 1,437,522.00, tahun 2018 Rp. 1,562,730.00, tahun 2019 Rp. 1,688,217.00, tahun 2020 sebesar Rp. 1,831,884.00 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1,852,099.00. Perbandingan pada tahun 2022 antara kota Bekasi dan kota Banjar terlihat sangat jauh bahkan UMK kota Banjar tidak sampai 50% dari UMK kota Bekasi. Ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakmerataan upah minimum di antara berbagai wilayah pada Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang melibatkan pengeluaran dalam bentuk belanja langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Belanja tidak langsung merujuk pada pengeluaran yang dialokasikan dalam mendanai kegiatan yang tidak secara

langsung terkait pada kegiatan perekonomian penduduk, seperti administratif. Di sisi lain, belanja langsung merujuk pada pengeluaran yang dipakai dalam mendanai aktivitas yang secara langsung terkait pada kegiatan perekonomian penduduk, contohnya belanja modal. Alokasi belanja yang baik tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta menambah penghasilan pada daerahnya, terutama kegiatan perekonomian seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, telekomunikasi, gedung dan sebagainya (Huda & Karsudjono, 2021). Belanja modal pemerintah, dalam prosesnya perlu adanya tenaga kerja untuk meningkatkan penyerapan lapangan kerja, yang disimpulkan pengangguran akan berkurang, karena orang yang memiliki pekerjaan akan lebih banyak serta memperoleh penghasilan (Arini Sita, 2016).



Sumber : Kemenkeu RI yang diolah (2023)

Grafik 1. 5 Belanja Modal di Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh kemenkeu RI, belanja modal pada tahun 2018-2022 di Jawa Barat mengalami fluktuatif. Belanja modal tertinggi terdapat pada tahun 2018 yakni 3.145,85 milyar, hal ini dapat digambarkan pada 2018 di Jawa Barat terjadi perkembangan dalam membangun sarana dan prasarana yang cukup tinggi jika dilihat data belanja modal pada tahun 2019. Kemudian belanja modal terendah terdapat di tahun 2020, dengan menurunnya yang cukup signifikan belanja modal pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan terjadinya pandemi covid-19 yang menjadikan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana terhambat. Tetapi pada tahun berikutnya belanja modal mengalami peningkatan setiap tahunnya, dapat diketahui pada tahun 2021-2022 pemerintah daerah Jawa Barat melakukan pembangunan agar terjadinya pemerataan infrastruktur dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ketersediaan fasilitas serta pelayanan publik yang berkualitas dapat diperoleh dengan kenaikan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menghasilkan lapangan kerja, memperluas angkatan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran melalui peningkatan permintaan tenaga kerja yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang berkembang (Rahmadi et al., 2022).

Investasi menjadi salah satu cara agar terjadinya peningkatan pembangunan negara yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Investasi juga berkaitan dengan pengangguran. Investasi dapat memengaruhi ketersediaan modal, yang dapat menciptakan pekerjaan baru. Modal dapat diinvestasikan melalui dua kategori : penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing. Perbedaan PMDN dan PMA terletak pada kepemilikan modal dan sumber daya yang digunakan untuk berinvestasi. PMDN menggunakan modal dalam negeri dan dimiliki oleh warga negara atau penduduk lokal, sedangkan PMA menggunakan modal asing dan dimiliki oleh perusahaan atau perorangan asing. Namun PMDN dan PMA memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan kegiatan usaha, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan keuntungan (Nursida et al., 2023). Salah satu upaya yang dapat diberlakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan tingkat investasi dalam Investasi modal dalam negeri serta investasi modal luar negeri (Adewi & Azhari, 2022).

Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya dan telah menghubungkan beberapa variabel yang terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, maka ditemukan gap penelitian :

- a. Penggunaan variabel belanja modal belum menjadi hal yang umum dalam penelitian sebelumnya.
- b. Fokus penelitian terletak pada seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat, mencakup 18 kabupaten 9 kota dengan menggunakan rentang waktu terbaru dari tahun 2015 hingga 2022.
- c. Rentang tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat senilai 8.31% selama tahun terbaru pada periode penelitian dan menjadi TPT tertinggi dari semua wilayah Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih seluruh wilayah di Jawa Barat sebagai objek, karena TPT provinsi Jawa Barat mencapai level tertinggi di

antara seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Menurut data BPS tahun 2022, Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten/kota juga menjadi urutan pertama berpenduduk terbanyak/tertinggi di Indonesia. Karena adanya penduduk yang banyak di Jawa Barat maka dapat terjadinya persaingan yang sangat ketat dalam mencari pekerjaan dan memungkinkan akan berdampak pada tingkat pengangguran.

Penelitian ini diperlukan untuk melakukan analisis lebih rinci terkait dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), belanja modal, serta investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat meliputi 18 kabupaten dan 9 kota selama tahun 2015-2022.

B. Rumusan Masalah

Mengenai pembahasan latar belakang yang sudah ada, dapat memperoleh beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2015-2022?
2. Bagaimana dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2015-2022?
3. Bagaimana dampak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2015-2022?

4. Bagaimana dampak belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2015-2022?
5. Bagaimana dampak investasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2015-2022?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dasar rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah :

1. Dengan tujuan untuk memahami dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2015-2022.
2. Dengan tujuan untuk memahami dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2015-2022.
3. Dengan tujuan untuk menyelidiki dampak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2015-2022.
4. Dengan tujuan untuk menganalisis dampak belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2015-2022.

5. Dengan tujuan untuk menyelidiki dampak investasi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2015-2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan menyalurkan manfaat ke berbagai golongan, diantaranya :

1. Manfaat praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan referensi pada bidang ekonomi dalam memahami tentang bagaimanakah tingkat pengangguran di suatu daerah.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat pada penelitian ini diharapkan berguna bagi pengambil kebijakan yang mampu menjadi bahan pertimbangan dengan penelitian lain sehingga berguna untuk mengidentifikasi kebijakan yang tepat dalam menanggulangi pengangguran di suatu daerah.